

# "Hidden Mission" Rapat Komisi III-Eks Penyidik KPK

Makroen Sanjaya | Jagat Opini, 26 November 2012 14:53



## Highlight

Oleh: Prof Dr Jamal Wiwoho--Guru Besar Fak. Hukum/  
Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta

Rabu, 21 November 2012, ada suatu pemandangan yang tidak biasa. Hari itu sebanyak 14 mantan penyidik KPK dari Polri yang didampingi oleh Kabareskrim Komjen Pol Sutarman dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Novel Ali mendatangi Komisi III DPR. Hasil pertemuan yang bersifat tertutup tersebut, menurut Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika, anggota komisi bertanya mengenai situasi di dalam KPK kepada mantan penyidik KPK tersebut yang salah satunya yang berkaitan dengan masalah penyadapan dan adanya dugaan kurang harmonis antara ketua KPK. Ketua Komisi III beralasan, bahwa keterangan eks penyidik KPK tersebut diperlukan untuk perbaikan KPK dan kepolisian.

Pertemuan antara Komisi III dengan mantan penyidik KPK yang berdurasi sekitar tiga jam tersebut, jelas menyisakan sebuah tanda tanya besar di dalam pemahaman publik saat ini. Beralasan kiranya tanda tanya besar tersebut jika dikaitkan dengan kurang harmonisnya hubungan antara KPK dengan DPR, dan antara KPK dengan Kepolisian. Publik masih ingat benar manakala beberapa waktu lalu hubungan antara KPK dengan DPR merenggang.

Hal ini terjadi saat beredarnya atau bocornya ide dari DPR untuk melakukan revisi atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga akan mengampustasi kewenangan KPK terutama yang berkaitan dengan hilangnya kewenangan melakukan penyadapan dan hilangnya kewenangan penuntutan.

Skenario untuk melakukan revisi UU KPK yang dirasa akan menggembosi kewenangan KPK tersebut mendapatkan penolakan publik yang luar biasa. Hal ini terlihat dengan jelas kala pada awal sampai pertengahan bulan Oktober 2012 hampir semua komponen masyarakat, mulai dari mahasiswa dan pelajar, akademisi, artis, tokoh agama, tokoh lintas agama, pegiat anti korupsi dll secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mendatangi gedung KPK untuk memberi dukungan kepada KPK atau berdemonstrasi mendukung KPK serta menentang rencana revisi UU KPK.

Besarnya penolakan yang diberikan oleh sebagian besar komponen masyarakat atas ide merevisi UU KPK tersebut secara terbalik dapat dimaknai bahwa masyarakat tidak menyetujui ide DPR untuk mencoba mengurangi kewenangan KPK. Karena disinyalir ide revisi tersebut akan memperlemah kedudukan lembaga penegakan hukum, khususnya dalam bidang korupsi ini. Dalam perspektif sosiologi dapat dimaknai bahwa adanya penentangan oleh publik terhadap ide DPR tersebut serta tanda makin kredibelnya kepercayaan publik pada KPK.

Di samping itu, hubungan kurang harmonis antara Kepolisian dengan KPK sudah terjadi sejak lama, dimulai dari istilah pertarungan antara cicak dan buaya jilit I yang dilontarkan Kabareskrim kala itu Komjen Susno Duaji, yang dilanjutkan dengan perebutan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan simulator SIM pada Korlantas yang diduga melibatkan Irjen Djoko Susilo, sebagai Kepala Korlantas waktu itu. Selain itu "penyergapan" kantor KPK oleh Polda Bengkulu untuk mengambil Novel Baswedan (salah seorang penyidik KPK) yang pada waktu bertugas di Polda Jambi, yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan di Bengkulu.

Melihat betapa "gentingnya" hubungan KPK- Kepolisian kala itu, hingga Presiden SBY harus meleraikan keduanya dan memberikan hak kepada KPK untuk menengahi dan menunjuk kasus di Korlantas sebagai kasus yang sebaiknya ditangani oleh KPK dan mengesampingkan sementara penanganan perkara Novel Baswedan tersebut.

Ketidak harmonisan hubungan KPK- Kepolisian tersebut berlanjut dengan tidak diperpanjangnya masa tugas 20 penyidik KPK dengan alasan pembinaan karier sebagai anggota korps polisi dan terakhir masyarakat dikejutkan dengan mundurnya 6 penyidik dari KPK yang Selanjutnya kembali ke korps Bayangkara.

Ada apa dengan pertemuan tertutup?

Cukup banyaknya rentetan peristiwa yang akhir-akhir ini menggelayut dan menunjukkan hubungan "setengah hati " dan kurang harmonis antara KPK dengan DPR, maka pertemuan tertutup antara anggota Komisi III dengan mantan penyidik KPK, dapat dipandang dari dua segi, yakni dengan positif thinking, maka apa yang disampaikan oleh ketua komisi III dan Kabareskrim yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut untuk meningkatkan sinergitas hubungan KPK-kepolisian kedepan, jika ada kekurangan dan kelebihan akan dibahas lebih lanjut dengan DPR sehingga DPR dapat mengambil strategi politik bagaimana dapat meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum khususnya KPK dan Kepolisian.

Pandangan yang kedua , patut dipertimbangkan apa yang disampaikan oleh anggota Komisi III Ruhut Sitompul, yang tidak hadir dalam rapat tertutup tersebut, dan menengarai "ada udang di balik batu" pada pertemuan eks penyidik KPK dengan anggota Komisi III tersebut. Artinya ada "hidden mission " pada pertemuan tersebut khususnya yang berkaitan dengan penyadapan dan masalah masalah kepemimpinan KPK. P

Pendapat Politisi Partai Demokrat tersebut kiranya dapat difahami, manakala sifat tertutupnya rapat kedua belah pihak (DPR dan Eks Penyidik Polri yang didampingi Kabareskrim) yang merupakan bisik-bisik dan curhat antar kedua mengenai keberadaan KPK. Dan siapa tahu bahwa ketertutupan rapat tersebut karena akan menyusun suatu skenario baru apakah pelemahan atau bahkan penguatan pada lembaga super body yang sering membuat telinga panas dan wajah merah, serta membuat pihak pihak tertentu sulit tidur.

Agar ada keseimbangan dalam memperoleh informasi oleh DPR mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harmonisasi kerja pimpinan KPK, perlakuan yang kurang adil kepada para penyidik, dan kinerja penyadapan oleh KPK maka ada baiknya Komisi III DPR perlu mengundang juga KPK dalam sidang komisi. Publik sangat mengharapkan hubungan yang harmonis antara penegak hukum, khususnya KPK dan Polisi. Semoga.